



BUPATI BELITUNG TIMUR

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
 4. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah;
 5. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Belitung Timur

di

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : PW.01/53/SE/BUPATI/2025
TENTANG
ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO
TAHUN 2025 - 2029

A. Umum

1. Pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 tanggal 23 November 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko telah dibentuk atau ditetapkan :
 - a. Bupati selaku Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Asisten Sekretariat Daerah selaku Unit Kepatuhan
 - d. Pejabat Eselon II selaku UPR Tingkat Eselon II;
 - e. Pejabat Eselon III selaku UPR Tingkat Eselon III;
 - f. Pejabat Eselon IV selaku UPR Tingkat Eselon IV;
 - g. Komite pengelolaan risiko di Tingkat Pemerintah Kabupaten; dan
 - h. Inspektur Daerah selaku penanggung jawab pembinaan dan pengawasan.

B. Penilaian Risiko

1. Penilaian risiko dilakukan pada tingkat Strategis Pemerintah Kabupaten, dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
2. Penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
3. Penilaian risiko strategis Pemerintah Kabupaten dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025 s.d 2029 dan diprioritaskan atas urusan sebagai berikut:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - 1) Bidang Urusan Pendidikan;
 - 2) Bidang Urusan Kesehatan;
 - 3) Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - 5) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - 6) Bidang Urusan Sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - 1) Bidang Urusan Tenaga Kerja;
 - 2) Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- 3) Bidang Urusan Pangan;
 - 4) Bidang Urusan Pertanahan;
 - 5) Bidang Urusan Lingkungan Hidup;
 - 6) Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 7) Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 8) Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 9) Bidang Urusan Perhubungan;
 - 10) Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika;
 - 11) Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - 12) Bidang Urusan Penanaman Modal;
 - 13) Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga;
 - 14) Bidang Urusan Statistik;
 - 15) Bidang Urusan Persandian;
 - 16) Bidang Urusan Kebudayaan;
 - 17) Bidang Urusan Perpustakaan;
 - 18) Bidang Urusan Kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan
- 1) Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan;
 - 2) Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
 - 3) Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
 - 4) Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
 - 5) Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
- d. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan:
- 1) Sekretaris Daerah;
 - 2) Sekretaris DPRD.
- e. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan;
- 1) Perencanaan;
 - 2) Keuangan;
 - 3) Kepegawaian;
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan;
 - 5) Penelitian dan Pengembangan.
 - 6) Pengawasan.
4. Penilaian risiko strategis Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dilakukan secara *Control Self Assesment (CSA)/ Forum Group Discussion (FGD)* oleh Pejabat Eselon II yang membidangi urusan Perencanaan selaku koordinator dan pendukung;
 5. Penilaian risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan secara *Control Self Assesment (CSA)/ Forum Group Discussion (FGD)* oleh masing-masing Perangkat Daerah atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 6. Penilaian risiko strategis Perangkat Daerah 5 (lima) tahunan disusun secara paralel dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 7. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan risiko strategis RPJMD tahun 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 8. Asisten Sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan membantu memantau pelaksanaan pengelolaan risiko strategis RPJMD tahun 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 9. Pejabat Eselon II sebagai UPR Tingkat Eselon II melaksanakan pengelolaan risiko strategis Renstra tahun 2025-2029 masing-masing sesuai pendelegasian kewenangannya;
 10. Kebijakan- kebijakan lainnya yang akan dilakukan dalam penilaian risiko Tahun 2025-2029;

Selanjutnya diharapkan kepada Saudara selaku UPR ditingkatannya masing-masing agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah melalui Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah untuk mengoordinasikan pengelolaan risiko strategis Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

sebagaimana terlampir dalam tabel penetapan konteks risiko RPJMD Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;

2. Asisten Sekretaris Daerah agar melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan risiko Strategis RPJMD Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 tersebut dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator;
3. Seluruh kepala Perangkat Daerah agar melaksanakan pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah masing-masing;
4. Hal-hal teknis dapat dikonsultasikan ke Inspektorat Daerah selaku Unsur Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian diucapkan terima kasih

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal: 11 November 2025

WAKIL BUPATI BELITUNG
TIMUR



KHAIRIL ANWAR

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan
Jl. Raya Manggar - Gantung, Manggar, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung 33511
Laman : www.beltim.go.id

Lampiran : Surat Edaran Bupati Belitung Timur
 Nomor : PW.01/53/SE/BUPATI/2025
 Tanggal : 11 November 2025

PENETAPAN KONTEKS RISIKO BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2025-2029

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	KET
Tujuan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi			
Sasaran	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	1. Nilai SAKIP 2. Indeks SPBE 3. Indeks Profesionalisme ASN 4. Indeks Pelayanan Publik 5. Maturitas SPIP	Nyaman Layanan Publik	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 4. Program Pendaftaran Penduduk 5. Program Pencatatan Sipil 6. Program Pengelolaan Arsip	1. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2. URUSAN STATISTIK 3. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4. URUSAN KEARSIPAN
			Program Internet Desa Nyaman	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Nyaman ASN Berkemajuan	1. Program Kepegawaian Daerah 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penataan Organisasi)	1. KEPEGAWAIAN 2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3. SEKRETARIAT DAERAH
			Nyaman Desa Berdaya RT Ku Nyaman	1. Program Administrasi Pemerintahan	1. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

				Desa 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DAN DESA 2. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3. URUSAN TENAGA KERJA
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 2. Opini BPK	Nyaman Bersinergi	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 3. Program Riset dan Inovasi Daerah 4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 5. Program Pengelolaan Keuangan 6. Program Pengelolaan Pendapatan 7. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 8. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 9. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 10. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 11. Program Perekonomian dan Pembangunan	1. UNSUR SEKRETARIAT DAERAH 2. UNSUR PENGAWASAN 3. UNSUR PERENCANAAN 4. UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5. UNSUR SEKRETARIAT DPRD 6. UNSUR KEUANGAN 7. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Tujuan	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia			
Sasaran	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harapan Lama Sekolah 2. Rata-Rata Lama Sekolah 3. Indeks Pembangunan 4. Literasi Masyarakat 	Nyaman Cerdas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 	URUSAN PENDIDIKAN
	Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia Harapan Hidup 2. Prevelensi stunting pada balita 3. Prevelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevelance of Undernourishment</i>) 	Nyaman Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 	URUSAN KESEHATAN
	Meningkatnya kesejahteraan sosial dan budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Kemiskinan 2. Indeks Pembangunan Kebudayaan 3. Indeks Pembangunan Gender 4. Indeks Pembangunan Pemuda 5. Indeks Perlindungan Anak 	Nyaman Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 	URUSAN SOSIAL
Tujuan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2. Produk Domestik Regional Bruto perkapita 3. Indonesia Blue Economy Index (IBEI) 4. Rasio Gini 	Petani & Nelayan Nyaman		
Sasaran	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyediaan dan Pengembangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. URUSAN PERTANIAN 2. URUSAN

		<ul style="list-style-type: none"> 2. dan Perikanan 2. PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum 3. PDRB Industri Pengolahan 4. tingkat inflasi 		<ul style="list-style-type: none"> 2. Sarana Pertanian 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 	<ul style="list-style-type: none"> 3. PERIKANAN DAN KELAUTAN 3. URUSAN PARIWISATA
			Nyaman Kreatif Nyaman	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 	
	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nilai Investasi Tahunan berskala nasional (PMA/PMDN) 	UMKM Ku Nyaman Berdaya	<ul style="list-style-type: none"> 2. Program Pengembangan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> 1. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 	Nyaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> 1. URUSAN TENAGA KERJA 2. URUSAN PENANAMAN MODAL
Tujuan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah			
Sasaran	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Gerbang Ekonomi	Program Pengelolaan Pelayaran	URUSAN PERHUBUNGAN
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Indeks Infrastruktur Wilayah	Infrastruktur Nyaman	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 3. Program Penyelenggaraan Jalan 4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 	<ul style="list-style-type: none"> 1. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2. URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Tujuan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Nyaman Lestari Nyaman Air Bersih		
Sasaran	Meningkatnya perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Indeks Risiko Bencana 		<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> 1. URUSAN KETENTERAMAN

	dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 3. Program Pengelolaan Persampahan 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
--	---	-------------------------------------	--	---	--

Sumber : RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029

WAKIL BUPATI BELITUNG
TIMUR,



KHAIRIL ANWAR